

RU

**Proses Collaborative Governance Untuk Mewujudkan Tata Kelola Mikrotrans Dalam
Sistem JakLingko Kota Jakarta Rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan**

Syauqi Rabbani, Retna Hanani, S.Sos, MPP.

**Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof.Soedarto, S.H, Tembalang, Kota Semarang, Kota Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on the process of collaborative governance to integrate microtrans management into the JakLingko public transportation system on the Jak.36 Cilangkap-Cililitan route. The research problem raised is how the collaborative governance process can realize the integration of microtrans management into the JakLingko system in Jakarta City on the Jak.36 Cilangkap-Cililitan route. The purpose of this study is to analyze and evaluate the collaboration process between stakeholders in microtrans management and its impact on the transportation system. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection through in-depth interviews, observations, and relevant literature studies. The results of the study show that the collaborative governance process in microtrans management within the JakLingko system is carried out through intensive face-to-face dialogues, usually held quarterly, with some unscheduled meetings. The process also includes the building of trust among stakeholders, as well as a shared commitment to running a sustainable collaborative process. Additionally, stakeholders make efforts to develop a common understanding of the program's vision and the challenges faced, which contribute to the effectiveness of the collaboration. This process is flexible and supported by a continuous evaluation mechanism to improve the effectiveness of transportation policies. The study concludes that collaborative governance has played a role in connecting various stakeholders to achieve a more efficient and well-managed transportation system. The conclusion emphasizes that a well-implemented collaborative governance process can create a transportation system that is more efficient, well-managed, and responsive to the needs of Jakarta's residents, particularly on the Jak.36 Cilangkap-Cililitan route.

Keywords: Collaborative Governance, Microtrans Management, JakLingko.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada proses s untuk dapat melakukan proses tata kelola mikrotrans ke dalam sistem transportasi publik JakLingko pada rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana proses *collaborative governance* dapat mewujudkan tata kelola mikrotrans ke dalam sistem JakLingko Kota Jakarta pada rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola mikrotrans serta dampaknya terhadap sistem transportasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam tata kelola mikrotrans ke dalam sistem JakLingko dilakukan melalui dialog tatap muka yang intensif dialog tatap muka biasanya dilakukan secara triwulan sekali dan terdapat juga pertemuan yang tidak terjadwal, pembentukan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, serta komitmen bersama dalam menjalankan proses kolaboratif yang berkelanjutan. Selain itu, *stakeholders* melakukan upaya pemahaman bersama mengenai visi program dan tantangan yang dihadapi juga berkontribusi pada efektivitas kolaborasi. Proses ini berlangsung secara fleksibel serta didukung oleh mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan transportasi. Proses ini menegaskan bahwa *collaborative governance* telah berperan dalam menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tata kelola transportasi yang lebih efisien dan tertata kelola. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa proses *collaborative governance* yang baik dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, tertata kelola, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Jakarta terutama pada Jak.36 Cilangkap-Cililitan. Saran

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Tata Kelola Mikrotrans, Jaklingko.

Pendahuluan

Mobilitas dan konektivitas menjadi isu utama di era peningkatan populasi, pembangunan ekonomi, dan globalisasi. Infrastruktur transportasi berperan penting dalam mempercepat arus barang dan jasa, namun juga menghadapi tantangan seperti polusi udara, kemacetan, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Di Jakarta, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 mengatur pengelolaan transportasi publik, termasuk peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengawasan sistem transportasi. Selama masa jabatan Anies Baswedan, SK Gubernur 2019 Nomor 66 diterbitkan untuk mengelola kualitas udara, dan program Jak-Lingko diluncurkan sebagai langkah revitalisasi angkutan umum. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 2019, yang menekankan kolaborasi

antara pemerintah, operator angkutan, dan pengguna jasa.

Peraturan DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 memberi tugas kepada BUMD untuk mengelola sistem pembayaran antar moda transportasi. Dengan kolaborasi antara Pemerintah DKI Jakarta, Dishub, operator mikrotrans, pengguna, dan akademisi, diharapkan sistem transportasi yang lebih efisien dan tertata dapat terwujud, serta mengatasi tantangan mobilitas dan konektivitas di Jakarta.

Tabel Jumlah Armada dan Penumpang Di Wilayah Cililitan dan Sekitarnya Pada April Tahun 2024

NO	Kode	Rute	Jumlah Unit	Jumlah penumpang
1.	Jak-06	Kampung Rambutan- Pondok gede	32	152.515
2.	Jak-16	Cililitan - Condet	37	203.798
3.	Jak-20	Cawang UKI-Lubang Buaya	25	130.405
4.	Jak-21	Cililitan- Dwikora3	20	173.851
5.	Jak-25	Kalisari-Kamung Rambutan	21	96.781
6.	Jak-28	Pasar Rebo-Taman Wiladatika	23	128.344
7.	Jak-36	Cililitan- Cilangkap	30	159.161
8.	Jak-71	Kampung Rambutan- Pinang Ranti	30	107.190
9.	Jak-73	St. LRT Hajar Mukti – Kramat jati	39	135.991
10.	Jak-75	Cililitan- Kampung Pulo via Halim	19	119.810

Sumber: ptransjakarta, 2024

Berikut merupakan tabel jumlah armada dan jumlah penumpang pada wilayah cililitan dan sekitarnya pada tabel tersebut terdapat rute Jak.36 yaitu rute Cilangkap-Cililitan yang

dimana dalam rute tersebut terdapat 30-unit armada jaklingko dengan jumlah penumpang 159.161 orang dalam periode 1 tahun. atau sekitar 436 penumpang per hari. Namun, angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan transportasi di wilayah tersebut. Ketersediaan armada yang terbatas menyebabkan peningkatan waktu tunggu bagi penumpang, terutama pada jam sibuk. Rute tersebut dijadikan peneliti sebagai lokus pada Penelitian tersebut.

Terdapat beberapa kendala dalam tata kelola angkutan konvensional ke dalam program Jak-Lingko, salah satunya adalah konflik kepentingan antaroperator mikrotrans yang menyebabkan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait rute, tarif, dan wilayah operasi. Hingga kini, belum ada mekanisme formal yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi dialog antaroperator, yang menyebabkan kurangnya komunikasi dan kepercayaan.

Kelemahan dalam kolaborasi ini diperparah oleh kepemimpinan daerah yang kurang proaktif dalam mengelola konflik kepentingan. Selain itu, belum adanya skema insentif yang jelas dan mekanisme kompensasi yang menarik bagi operator mikrotrans menghambat partisipasi mereka dalam sistem JakLingko. Keterbatasan administratif dan teknis Badan Pengelola JakLingko juga menjadi faktor penghambat utama, dengan minimnya sumber daya manusia, anggaran, dan sistem informasi yang efektif. Pemerintah daerah masih berperan sebagai regulator tanpa membangun ruang dialog yang inklusif, yang memperbesar kesenjangan antara pemerintah dan operator mikrotrans serta menghambat proses integrasi. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sinkronisasi antar stakeholders menjadi langkah penting agar tata kelola angkutan konvensional dapat terlaksana dengan baik dan proses integrasi berjalan lebih efektif dan inklusif.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses collaborative governance dalam mewujudkan tata kelola mikrotrans dalam sistem Jak-Lingko, khususnya pada rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan. Penelitian ini mengumpulkan data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian mendetail tentang dinamika serta tantangan dalam implementasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Lokus penelitian ini terletak di Jakarta, yang merupakan daerah dengan kompleksitas tinggi dalam pengelolaan transportasi publik. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana berbagai aktor termasuk pemerintah daerah, operator mikrotrans, dan pengguna jasa berkolaborasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem transportasi. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan pemilihan sumber data berdasarkan karakteristik tertentu untuk memastikan informasi yang diperoleh relevan dan mendalam. Proses pemilihan responden mencakup berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Perhubungan DKI Jakarta, operator mikrotrans, dan masyarakat pengguna layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, sementara data sekunder mencakup dokumentasi dan literatur yang relevan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, teknik triangulasi digunakan dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data guna mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis mengenai meneliti *proses collaborative governance* dalam mewujudkan tata kelola mikrotrans pada sistem Jak-Lingko, khususnya untuk rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, operator mikrotrans, dan pengguna jasa, dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kolaborasi antara aktor-aktor tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan mikrotrans dan mengatasi tantangan yang ada dalam implementasinya.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan topik yang diteliti. Informan tersebut meliputi pejabat Dinas Perhubungan, pengelola operator mikrotrans, serta pengguna layanan transportasi yang sering menggunakan rute Jak.36. Proses wawancara ini dirancang untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan, harapan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi tata kelola mikrotrans.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mencerminkan perspektif para informan selama sesi wawancara. Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian tidak hanya mengungkapkan data faktual, tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas mengenai dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola mikrotrans, termasuk komunikasi antar pihak, kebijakan yang ada, serta partisipasi pengguna dalam pengambilan keputusan. Sebagai tambahan, data sekunder juga digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Data ini mencakup literatur terkait, dokumen kebijakan, serta laporan penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan menyatukan data primer dan sekunder, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai proses *collaborative governance* dalam sistem Jak-Lingko dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada peningkatan layanan transportasi publik di Jakarta. Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan sistem transportasi yang lebih baik di masa depan.

Proses *Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Tata Kelola Mikrotrans Ke dalam Program Jaklingko Kota Jakarta Rute Cililitan-Cilangkap

Hasil penelitian mengenai proses *collaborative governance* dalam mewujudkan tata kelola mikrotrans ke dalam program JakLingko, khususnya pada rute Cililitan-Cilangkap. Penelitian ini mengacu pada teori proses *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menyoroti dimensi-dimensi penting dalam kolaborasi, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan bagaimana berbagai pemangku kepentingan berinteraksi dan berkolaborasi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik.

a. Frekuensi Pertemuan

Frekuensi pertemuan antara *stakeholders* memiliki dampak signifikan terhadap kualitas kolaborasi dan hubungan antar pihak

yang terlibat. Semakin sering pertemuan dilakukan, semakin positif hubungan antar *stakeholders*, yang berimplikasi pada peningkatan kolaborasi karena mereka merasa lebih terlibat dan memiliki kesempatan untuk berbagi ide serta memberikan masukan.

b. Negosiasi atas dasar kepercayaan yang baik

Dalam konteks penelitian mengenai proses *collaborative governance* untuk mewujudkan tata kelola mikrotrans ke dalam sistem JakLingko Kota Jakarta rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan, Negosiasi ini memainkan peran penting dalam membangun kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam negosiasi ini. Forum diskusi berfungsi sebagai platform penting untuk bertukar pikiran dan informasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam konteks tata kelola mikrotrans ke dalam sistem JakLingko Kota Jakarta rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan. Melalui

wawancara dengan berbagai informan, terungkap bahwa pertemuan yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta, BP BUMD, dan Dinas Perhubungan berlangsung secara formal dan terjadwa. Jenis yang dilakukan itu lebih banyak menggunakan Forum Group Discussion(FGD),

c. Upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan antar stakeholders

Pada aspek Ini para operator khawatir tentang investasi yang harus mereka lakukan untuk unit baru dan potensi risiko jika investasi tersebut tidak berkelanjutan. PT Transportasi Jakarta telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti memberikan penjelasan tentang nilai dan tata cara pembayaran, serta melakukan standarisasi unit yang sudah ada. Salah satu upaya signifikan yang dilakukan adalah mengajak calon operator untuk studi banding ke Korea, di mana mereka dapat melihat langsung sistem pengelolaan transportasi yang lebih maju.

d. Konsistensi Stakeholders dalam menjalankan komitmen

Proses pengkajian laporan, survei lapangan, dan adanya Standard Operating Procedure (SOP) dari Transjakarta menciptakan transparansi dan kepastian yang penting dalam membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Selain itu, komitmen operator untuk lebih dalam melakukan proses tata kelola unit dan membuka rute baru mencerminkan konsistensi dalam menjalankan tugas mereka. Secara keseluruhan, kolaborasi ini berfokus pada peningkatan layanan transportasi publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

e. Saling memahami ketergantungan

Saling memahami ketergantungan antar pihak menjadi kunci utama dalam membangun komitmen terhadap proses yang telah disepakati. Dalam konteks ini, kesadaran masing-masing pihak akan peran dan kontribusi mereka sangat penting untuk

memastikan kelancaran dan keberhasilan tata kelola. Ansell dan Gash menekankan bahwa komitmen terhadap proses ini tidak hanya muncul dari kesepakatan formal, tetapi juga dari pemahaman mendalam tentang ketergantungan yang ada antar pihak. Dalam konteks *collaborative governance* untuk tata kelola Mikrotrans ke dalam sistem JakLingko di Jakarta, terutama pada rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan, kesadaran ini mencerminkan pemahaman mendalam para pemangku kepentingan mengenai tanggung jawab mereka masing-masing.

Kesadaran masing-masing pihak akan peran dan kontribusi mereka dalam menyukseskan proses tata kelola menjadi kunci keberhasilan kolaborasi ini. Komitmen institusional pemerintah untuk mendukung pengusaha angkutan umum dan komitmen terhadap tujuan bersama untuk meningkatkan sistem transportasi di Jakarta menjadi fundamental dalam membangun kemitraan yang efektif. Dalam konteks *collaborative governance*,

baik pemerintah, operator transportasi, maupun masyarakat pengguna harus memahami peran mereka dan berkontribusi secara aktif untuk mencapai tujuan bersama. Program Jak-Lingko, yang mampu melakukan tata kelola berbagai moda transportasi, mencerminkan perubahan positif dalam hubungan antara pemerintah dan pengusaha angkutan umum, di mana pemerintah kini lebih responsif terhadap kebutuhan operator

f. Kepemilikan bersama

Kepemilikan proses bersama mengacu pada pemahaman bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat memiliki peran yang sama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks ini, rasa tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting. Tanggung jawab ini tidak hanya melibatkan pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan, tetapi juga kesadaran akan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil bersama.

Rasa tanggung jawab ini sangat penting dalam konteks proses *collaborative governance* untuk mewujudkan tata kelola mikrotrans ke dalam sistem Jak Lingko Kota Jakarta Rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan. Dalam kerangka kerja ini, setiap *stakeholders*, termasuk pemerintah dan operator angkutan, harus menyadari peran dan kontribusi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen terhadap proses dan transparansi dalam pelaporan kinerja menjadi kunci untuk membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Program Jak-Lingko sendiri merupakan sistem transportasi tertata kelola yang menghubungkan berbagai moda transportasi di Jakarta, termasuk Mikrotrans. Dengan adanya sistem ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih efisien dan terjangkau. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pengusaha angkutan umum, serta kesadaran akan tanggung jawab masing-masing, proses tata kelola ini dapat

berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.

g. Keterbukaan Terhadap pengembangan pencapaian Bersama

Keterbukaan terhadap capaian bersama menciptakan ruang bagi setiap *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pengembangan. Setiap perkembangan, baik itu mengenai perbaikan infrastruktur, pengelolaan rute, atau evaluasi kinerja, perlu disampaikan secara transparan kepada semua pihak yang terlibat. Ini membantu membangun kepercayaan antar pihak, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program ini.

Keterbukaan pada pengembangan bersama juga melibatkan pihak komunitas, di mana masukan dan kebutuhan mereka sangat diperhatikan dalam proses perbaikan layanan. Dengan melibatkan komunitas

disabilitas dalam diskusi tentang layanan Transjakarta, pihak terkait dapat memastikan bahwa fasilitas yang disediakan benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Keterlibatan aktif ini juga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih tepat sasaran, karena setiap pihak yang terdampak langsung dapat memberikan perspektif yang relevan dan konstruktif dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan dijelaskan bahwa pihak yang terlibat berkomitmen untuk mendengar langsung suara dari komunitas disabilitas, yang merupakan salah satu pengguna utama layanan Transjakarta. Hal ini bertujuan pula untuk mengevaluasi sejauh mana layanan yang ada sudah inklusif, tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

h. Misi yang jelas

Analisis mengenai pemahaman *stakeholders* terkait visi program dan manfaat tata kelola Mikrotrans ke dalam program JakLingko menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, operator, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan sistem transportasi publik yang lebih baik di Jakarta. Pemahaman bersama mengenai visi program sangat penting agar semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem transportasi yang tertata kelola, efisien, dan ramah lingkungan. Melalui rapat koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala, *stakeholders* dapat mendiskusikan peran masing-masing dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program. Dengan adanya kesepahaman ini, diharapkan tata kelola mikrotrans dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi, mengurangi kemacetan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta dalam hal mobilitas yang lebih baik. Serta komunikasi yang

efektif dan kolaborasi yang kuat, semua pihak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan sistem transportasi publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jakarta.

I. Definisi masalah bersama

Definisi masalah bersama terkait kendala yang dihadapi sangat krusial untuk keberhasilan tata kelola mikrotrans ke dalam sistem JakLingko. Kendala anggaran dan pencapaian target operasional menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Dalam situasi di mana kepentingan tidak dapat ditemukan titik temu, kompromi dan kemampuan untuk bernegosiasi menjadi sangat penting. Keselarasan pemahaman ini akan mendukung kolaborasi yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan tata kelola transportasi. Dengan demikian, dialog konstruktif dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mengatasi kendala dan

memastikan keberhasilan program JakLingko dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Jakarta. Serta, penting bagi semua *stakeholders* untuk berkomunikasi secara terbuka dan menjalin kerja sama yang efektif agar tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik dapat tercapai.

J. Identifikasi Nilai-Nilai Bersama

Dalam membangun kolaborasi yang efektif, *shared understanding* menjadi elemen kunci yang memastikan setiap stakeholder memiliki persepsi yang sejalan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Keselarasan pemahaman ini membantu memperjelas peran, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara kolektif, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi. Selain itu, identifikasi nilai-nilai bersama turut memperkuat dasar kolaborasi. Kesepahaman terhadap prinsip-prinsip seperti keterbukaan, kepercayaan, dan

keberlanjutan menjadi landasan penting dalam membangun hubungan kerja yang harmonis. Dengan menyepakati nilai-nilai ini, potensi konflik dapat diminimalisir, dan setiap keputusan yang diambil akan selaras dengan tujuan bersama demi tercapainya hasil yang berkelanjutan.

Kolaborasi antar *stakeholder* dalam sistem transportasi umum sangat bergantung pada *shared understanding* dan komunikasi yang efektif. Kesepahaman mengenai peran dan tujuan bersama menjadi landasan penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program. Dengan adanya pemahaman yang sejalan, setiap *stakeholder* mampu menjalankan tanggung jawabnya secara terarah dan saling melengkapi. Selain itu, komunikasi terbuka dan negosiasi yang adil memainkan peran penting dalam menyelaraskan perbedaan kepentingan antar *stakeholder*. Proses dialog yang aktif memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi

yang mengakomodasi kebutuhan bersama. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun tidak hanya memperkuat hubungan kerja, tetapi juga mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

k. Rencana strategis

Aspek ini tentunya merupakan aspek penting dalam sebuah proses kolaborasi. Dalam konteks ini, keakuratan strategi tentu saja menjadi aspek yang perlu diamati untuk mendapat hasil yang diinginkan dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui bagaimana keakuratan strategi yang diterapkan, peneliti sudah melakukan wawancara untuk menggali informasi. bahwa kesesuaian dalam pengembangan proses tata kelola transportasi di Jakarta merupakan aspek krusial yang diamati untuk menilai indikator hasil sementara. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, terungkap bahwa meskipun tata kelola sistem

transportasi masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya tertata kelola, kemajuan yang dicapai sudah dianggap cukup baik. Selain itu, pernyataan mengenai penerapan standar operasional prosedur (SOP) bagi sopir menggarisbawahi dampak positif terhadap profesionalisme dan kepercayaan masyarakat, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Secara keseluruhan, wawancara ini mengindikasikan bahwa melalui kolaborasi dan inovasi berkelanjutan, keakuratan strategi dalam pengembangan tata kelola transportasi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan tata kelola Mikrotrans ke dalam sistem JakLingko di Jakarta, sesuai dengan dimensi hasil sementara.

I. Temuan Bersama

Proses pengembangan tata kelola Mikrotrans melibatkan aspek rencana strategis yang disusun secara kolaboratif oleh *stakeholder*

terkait. Aspek ini diikuti dengan temuan bersama dari kesepakatan yang telah dibuat selama proses kolaborasi berlangsung. Temuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik mampu menghasilkan kesepakatan antar *stakeholder*. Implementasi hasil kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Dengan adanya temuan bersama, setiap *stakeholder* memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan perannya guna memastikan keberlangsungan program secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nyata dari kesepakatan antar *stakeholders* dalam konteks ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak hanya ada di tataran teori, tetapi juga tercermin dalam tindakan konkret yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat implementasi nyata dari kesepakatan-

kesepakatan yang telah dibuat dalam proses penerapan tata kelola mikrotrans ke dalam program Jak-Lingko, sesuai dengan dimensi hasil yang diharapkan.

m. Kemenangan Kecil

Dalam proses implementasi tata kelola Mikrotrans pada program Jak Lingko, keberhasilan kolaborasi tidak hanya terlihat dari kebijakan besar yang dihasilkan, tetapi juga dari pencapaian kecil yang menunjukkan perkembangan nyata. Setiap langkah strategis yang berhasil direalisasikan, seperti peningkatan jumlah armada, integrasi rute, atau peningkatan kualitas pelayanan, menjadi indikasi bahwa proses kolaborasi berjalan secara efektif. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibuat antar *stakeholder* tidak hanya sebatas wacana, tetapi diwujudkan dalam bentuk implementasi nyata di lapangan. Pencapaian kecil ini dikenal sebagai *small win*, yang berperan penting dalam memperkuat dinamika

kolaborasi. *Small win* memberikan dorongan motivasi bagi *stakeholder* untuk terus melanjutkan kerja sama, memperkuat kepercayaan, dan membangun komitmen terhadap tujuan bersama. Dengan adanya *small win*, *stakeholder* lebih optimis dalam menjalankan perannya, sehingga memperkuat hubungan kerja dan mendorong keberlanjutan kolaborasi.

Keberhasilan dalam peningkatan kualitas pramudi dan strategi distribusi armada memperkuat kepercayaan antar *stakeholder* dalam menjalankan program Jak Lingko. Setiap pencapaian kecil menjadi motivasi untuk terus melanjutkan kolaborasi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi publik yang lebih baik. *Small win* ini juga membangun optimisme bahwa perubahan bertahap dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Dengan adanya *small win*, *stakeholder* memiliki bukti nyata bahwa kolaborasi yang dilakukan menghasilkan

dampak signifikan, meskipun dalam skala kecil. Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan program dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses kolaborasi selaras dengan tujuan bersama. *Small win* tidak hanya memperkuat hubungan kerja antar *stakeholder*, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya proses collaborative governance dalam tata kelola Mikrotrans di sistem Jak-Lingko, khususnya pada rute Jak.36 Cilangkap-Cililan. Kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, operator Mikrotrans, dan masyarakat pengguna, menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada. Dari dimensi dialog tatap muka, terlihat bahwa meskipun pertemuan antar pemangku kepentingan seperti PT Transportasi Jakarta, BP BUMD,

dan Dinas Perhubungan telah dilakukan secara terjadwal, efektivitas komunikasi yang kurang memadai masih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan dan solusi. Proses membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan memerlukan waktu dan usaha terus-menerus, dan tanpa rasa saling percaya, koordinasi serta komitmen untuk mencapai tujuan bersama menjadi sulit. Selain itu, keterlibatan aktif dalam proses kolaborasi sangat penting untuk mendorong komitmen kolektif, meskipun hasil yang diharapkan tidak selalu sejalan dengan kepentingan individu. Pemahaman bersama mengenai visi program dan manfaat tata kelola mikrotrans juga menjadi kunci dalam mengatasi kendala yang muncul, terutama terkait dengan anggaran dan pencapaian target.

Meskipun masih dalam tahap pengembangan, kemajuan yang dicapai dalam tata kelola mikrotrans sudah menunjukkan hasil yang positif. Kolaborasi

yang baik antara pemerintah, operator, dan masyarakat berpotensi menghasilkan perubahan yang signifikan dalam sistem transportasi publik di Jakarta. Dengan demikian, proses collaborative governance ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, tertata kelola, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jakarta.

Saran

1. Pada subfenomena dialog tatap muka, para pihak *stakeholders* harus melakukan peningkatan frekuensi dan kualitas pertemuan dengan cara mengadakan pertemuan lebih sering dengan format yang bervariasi, termasuk workshop dan diskusi kelompok kecil, untuk membahas isu-isu operasional dan evaluasi kinerja.
2. Pada subfenomena pemahaman bersama, Para pihak *stakeholders* harus melakukan penguatan

keterbukaan informasi dan komunikasi, dimana hal ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan *platform* digital yang memungkinkan semua pemangku kepentingan mengakses data dan informasi terkini mengenai program tata kelola mikrotrans. Ini dapat mencakup laporan berkala, analisis kinerja, dan update tentang langkah-langkah yang diambil.

3. Dilakukan upaya untuk membangun kepercayaan oleh PT Transportasi Jakarta dengan pemangku kepentingan lain melalui kegiatan bersama, seperti pelatihan atau studi banding ke daerah yang telah berhasil melakukan tata kelola sistem transportasi. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan agar rasa

saling percaya di antara mereka semakin meningkat.

4. Pada subfenomena hasil sementara, *stakeholders* perlu menetapkan mekanisme evaluasi yang terstruktur untuk menilai kemajuan dan hasil dari kolaborasi secara berkala. Ini termasuk penentuan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas sehingga semua pihak dapat memahami kontribusi mereka terhadap tujuan bersama.
5. Pada permasalahan sub-fenomena Pemahaman bersama *stakeholders* dapat membuat forum atau survei yang melibatkan masyarakat pengguna untuk mendapatkan masukan langsung mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem transportasi.

Daftar Pustaka

Abenoza, Roberto F., Oded Cats, and Yusak O. Susilo. "Travel satisfaction

with public transport: Determinants, user classes, regional disparities and their evolution." *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 95 (2017): 64-84.

Adinegoro, K. R. R. (2022). Implementasi Sikap Kolaboratif dan Multikultural dalam Kepemimpinan pada Tata kelola dan Penataan Transportasi Umum "JAK LINGKO" di DKI Jakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 1-11.

Al-Adha, Y., & Atmojo, M. E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM JAK LINGKO DALAM UPAYA MENURUNKAN INDEKS KEMACETAN DI DKI

- JAKARTA. DEMOKRASI, 3 (1).
- Arif, A. A., Falyani, F. K., Sari, V., & Anggraini, R. I. (2023, May). *JakLingko: The Implementation of Integrated Transportation Approach in Jakarta Smart City. In Business Innovation and Engineering Conference (BIEC 2022) (pp. 310-316). Atlantis Press.*
- Bangun, G. E., & Suwandi, I. M. (2024). *Evaluasi kebijakan tata kelola angkutan pengumpan ke dalam sistem bus rapid transit: Studi pada Mikrotrans Jaklingko. SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10, 154-171.*
- Firdaus, M. R., Soesanto, E., & Yulian, F. A. (2024). *IMPLEMENTASI BERBASIS UUD 1945 PADA KEPUASAN PUBLIK TERHADAP TRANSPORTASI UMUM JAKLINGKO DI DKI JAKARTA. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(6), 345-356.*
- Irsyad Alfikri, M. A. (2022). *KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN TATA KELOLA TRANSPORTASI UMUM DKI JAKARTA: JAKLINGKO. Journal of Politic and Government Studies, 94-105.*
- Kodariyah, L., Kurniawan, I. A., & Firdiyani, F. (2022). *KOLABORASI STAKEHOLDERS DALAM*

MELAKSANAKAN
PROGRAM LAYANAN
TRANSPORTASI TATA
KELOLA JAKLINGKO DI
PROVINSI DKI
JAKARTA. JURNAL
ILMIAH ILMU
ADMINISTRASI, 12(1), 1-9.

Dan Ilmu Administrasi Publik
(JMIAP), 3(4), 291-296.

Noveesra Zahra, I. B. (2020). Evaluasi
Kualitas Pelayanan pada
Industri Angkutan Umum:
Studi Kasus Mikrotrans Jak
Lingko. JURNAL SAINS
DAN SENI ITS.

Litman, T. (2017). Evaluating Public Transit
Criticism: Systematic
Analysis of Political Attacks
on High Quality Transit, and
How Transportation
Professionals Can Effectively
Respond. Public Transport
Research Group , 1-95.

Pratama, M. W., Aditya, T., Nurlukman, A.
D., & Fadli, Y. (2023). Faktor
Yang Mempengaruhi
Masyarakat Dalam
Menggunakan Aplikasi Jak
Lingko. Risenologi, 8(2), 48-
58.

Mashpufah, R. N. (2021). Analisis Kebijakan
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam Mengatasi
Permasalahan Transportasi di
Perkotaan. Jurnal Manajemen

Putranto, B. D. (2023). PERSEPSI
PENGGUNA
TRANSPORTASI UMUM
DI JABODETABEK
TERHADAP TATA
KELOLA TARIF PT
JAKLINGKO INDONESIA.

- Jurnal Mitra Teknik Sipil, 71-84.
- Rachman, F. F., Nooraeni, R., & Yuliana, L. (2021). Public Opinion of Transportation integrated (Jak Lingko), in DKI Jakarta, Indonesia. *Procedia Computer Science*, 179, 696-703.
- Rahma, H. A., Rosyadi, S., & Gunarto, G. (2024). Collaborative Governance in Management of the JakLingko Program (Case Study on Public Transportation Management in DKI Jakarta). *Journal of Economics, Bussiness and Management Issues*, 2(1), 36-46.
- Retno Sunu Astuti, H. W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. (T. D. Press, Penyunt.) Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- RUSMAN, C. S. (2022). Implementasi Kebijakan Smart City di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Kebijakan Smart Mobility melalui Program Jak Lingko di Kota Jakarta Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Sahara, S., & Iqbal, M. (2024). Pengaruh Tarif Tata kelola Jaklingko Terhadap Minat Mobilitas Pengguna Angkutan Umum Di Wilayah Dki Jakarta. *Jurnal Sistem*

- Informasi Bisnis di Era Modern. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 21(1), 380-396.
- Satria, B. A., & Hermianto, H. (2020). Collaborative Governance Dalam Program Perhutanan Sosial Pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (JUAN), 8(2), 98-110.
- Susilo, Y. O., Santosa, W., Joewono, T. B., & Parikesit, D. (2007). A reflection of motorization and public transport in Jakarta Metropolitan Area. *IATSS research*, 31(1), 59-
- Tobing, D. L., Sitepu, G. F. Y., Sidabutar, H. T., Batubara, D. P., & Chairunisa, P. (2024). Dampak Globalisasi dan Digitalisasi Terhadap Partisipasi Kewarganegaraan
- Ulumidin, A. F., Moersidik, S. S., & Aritenang, W. (2013). Analisis Keberlanjutan Lingkungan Pada Angkutan Massal Transjakarta Sustainable Environment Analysis for Public Transport Transjakarta. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 15(3), 119-132.
- Waluyo, P. A. (2024). RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK TERTATA KELOLA DI DKI JAKARTA (Studi Kasus Dampak Keberadaan Jaklingko Terhadap

Keberlanjutan Angkutan Kota Konvensional Di Jakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Wildan Fido Ramadhan, A. H. (2024). Analisis Adaptasi Sopir Angkutan Kota Konvensional Di Jakarta Dalam Menghadapi Dampak Kehadiran Mikrotrans Jak Lingko. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 87-99.

Wijianto, W., Istianto, B., & Rukman, R. (2022). Analisis Kepuasan Publik Terhadap Angkutan Umum Model Jak Lingko Sebagai Pengtata kelola Antar Moda Transportasi Publik Di DKI Jakarta. *Jurnal Keselamatan Transportasi*

Jalan (Indonesian Journal of Road Safety), 9(2), 119-130.

Zahra, N., Baihaqi, I., & Ardiantono, D. S. (2020). Evaluasi Kualitas Pelayanan Pada Industri Angkutan Umum: Studi Kasus Mikrotrans Jak Lingko. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 9(1), D58-D63.